

BAB II

DINAMIKA PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)

DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI DUNIA ISLAM

Bab ini akan membahas tentang dinamika peran OKI dalam penyelesaian konflik di dunia islam. Pada sub bab pertama, akan dijelaskan tentang latar belakang berdirinya OKI, selanjutnya akan dijabarkan pada anak sub bab mengenai visi, misi, badan-badan serta struktur organisasi OKI. Kemudian pada sub bab dua, akan dibahas secara rinci peran OKI dalam menangani konflik dinegara-negara islam, khususnya negara-negara anggota OKI seperti Palestina dan Nigeria serta akan dibahas pula mengenai peran OKI pada fenomena islamphobia yang marak di dunia barat khususnya Eropa dan Amerika.

A. Profil Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

1. Latar Belakang berdirinya Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

OKI merupakan organisasi internasional yang didirikan diRabat, Marokpada 25 September 1969 yang ditunjukan untuk mengumpulkan seluruh sumber daya anggotanya, serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan dari seluruh masyarakat negara anggota dan seluruh umat islam di dunia.¹² Dipicu oleh pembakaran masjid Al-Aqsha di Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969, timbul reaksi keras dunia terutama oleh umat islam. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan

¹² "About OIC" di akses dari OIC.org pada tanggal 10 Septeber 2014

mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia islam dan mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan kebebasan Al-Quds.

Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dengan panitia persiapan yang terdiri dari Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko terselenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) islam yang pertama kali pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Dari konferensi inilah titik awal terbentuknya OKI.

Secara umum latar belakang terbentuknya OKI adalah sebagai berikut :

Tahun 1964 : Pada KTT arab di Madinah timbul suatu ide untuk menghimpun kekuatan islam dalam suatu wadah internasional.

Tahun 1965 : Diadakan Liga Arab di Jeddah, Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat islam sebagai suatu kekuatan yang menonjol dan menggalang solidaritas islamiah dalam rangka melindungi umat islam dari zionisme yahudi.

Tahun 1967 : Pecah perang timur tengah melawan Israel, hal ini yang memicu timbulnya solidaritas negara-negara timur tengah.

Tahun 1968 : Raja Faisal dari Saudi Arab mengadakan kunjunganke beberapa negara islam dalam rangka peninjauan lebih lanjut untuk membentuk suatu organisasi islam internasional.

Tahun 1969 : Pada tanggal 21 Agustus 1969 Israel membakar masjid Al-Aqsha. Peristiwa tersebut merupakan puncak kelarahan umat islam terhadap Zionist Israel.

Setelah peristiwa tersebut mantan pemimpin Yerusalem, Amin Al-Haisaini mengirimkan pesan kepada seluruh negara muslim, untuk segera diadakan Konferensi Tingkat Tinggi untuk membahas peristiwa pembakaran tersebut. Negara-negara non-Arab seperti Indonesia, Iran, Pakistan, Turki segera mengeluarkan surat resolusi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi kutukan terhadap tindakan Israel tersebut. Surat tersebut dikeluarkan secara bersama-sama sebagai aksi cepat tanggap negara-negara non-Arab.

Berbagai aksi protes juga berdatangan dari berbagai negara muslim di dunia, serta mendukung diadakannya KTT Islam. Dalam sidang darurat Liga Arab diusulkan agar Saudi Arabia atau Maroko menjadi tuan rumah dan memprakarsai KTT tersebut. Sekitar satu bulan setelah terjadinya pembakaran masjid Al-Aqsha yaitu pada tanggal 22-25 September 1969, 24 kepala negara dan kepala pemerintahan negara Islam dan negara yang berpenduduk mayoritas muslim mengadakan KTT I di Rabat, Maroko. Dari pertemuan puncak tersebut dilahirkan kesepakatan untuk mewujudkan adanya saling tukar pandangan antar negara-negara Islam agar tercipta saling pengertian satu sama lain. Juga melakukan kerjasama erat dibidang ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan bidang-bidang spiritual yang diilhami oleh ajaran Islam.

Setahun setelah diadakan KTT, pada tanggal 23-25 Maret 1970 diadakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) yang dihadiri oleh para menteri luar negeri negara muslim. Pada konferensi tersebut diputuskan dibentuknya suatu Sekretariat jendral (*The General Secretariat*) OKI yang bermarkas di Jeddah. Tengku Abdurahman, perdana menteri Malaysia dinobatkan untuk menjadi

solver dengan mempertahankan umat islam dan bangsa muslim dari bahaya yang menimpa.

Selanjutnya misi OKI adalah meningkatkan peran negara-negara muslim untuk turut serta memikirkan masalah-masalah dunia pada umumnya dan dunia islam pada khususnya dalam melalui peningkatan peran, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam mewujudkan hal tersebut OKI melakukan dengan langkah-langkah strategis seperti misal dengan mengadakan rangkaian kerjasama bersama organisasi internasional lainnya seperti PBB, dan gerakan-gerakan non blok. Hal ini dikakukan karena aktifitas politik tidak dapat dilakukan sendirian.

3. Tujuan Dan Prinsip Organisasi Kerjasama Islam

Seperti yang tercantum dalam Piagam OKI, tujuan Organisasi Kerjasama Islam adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Untuk memajukan solidaritas islam diantara negara anggota.
2. Menggalang kerjasama diantara negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, IPTEK, dan bidang-bidang penting lainnya dan memfasilitasi konsultasi diantara negara anggota dalam organisasi internasional.
3. Mengambil langkah-langkah penting untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional yang berlandaskan keadilan.
4. Menggalang usaha untuk melindungi tempat-tempat suci dan mendukung rakyat Palestina serta membantunya untuk memperoleh hak-hak dan kebebasan tanah air mereka.

¹⁵ "OIC Charter" diakses pada OIC.org pada 6 September 2014

5. Memperkuat perjuangan umat islam untuk melindungi martabat, kemerdekaan dan hak-hak nasional mereka.

Sebagai sebuah organisasi internasional OKI memiliki prinsip-prinsip, dimana dengan prinsip tersebut para negara anggota dapat bekerja sama dan digunakan sebagai pedoman dalam setiap langkah-langkah yang ambil. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :¹⁶

1. Persamaan penuh diantara negara-negara anggota.
2. Menghormati dan menentukan nasib sendiri dan tidak campur tangan dalam setiap masalah-masalah dalam negeri negara anggota.
3. Menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integrasi teritorial masing-masing negara anggota
4. Setiap persengketaan yang terjadi harus diselesaikan dengan cara-cara perdamaian, misalkan dengan cara perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrase.
5. Menjauhi dari upaya menekan atau menggunakan perlawanan kekerasan terhadap integritas teritorial, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik negara anggota.

4. Stuktur dari Organisasi Kerjasama Islam

Pada KTT pertama, para pemimpin OKI menyadari pentingnya peraturan umah. Para pemimpin negara dan pemerintahan memutskan untuk membuat

¹⁶ ibid

intituti politik yang permanen sebagai sarana menyalurkan kepentingan muslim.¹⁷ Oleh karena itu dalam piagam OKI ditekankan bahwa struktur dan prosedur utamanya sebagai organisasi internasional yang berdasarkan pada ide-ide kedaulatan negara anggotanya. Berikut ini beberapa stuktur organisasi dari OKI :

18

a) Konferensi Para Raja dan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

Konferensi Para Raja dan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan merupakan badan otoritas tertinggi dalam OKI. Konferensi ini diadakan setiap tiga tahun sekali untuk membahas dan mengkoordinasikan kebijakan mengenai masalah-masalah yang menyangkut kepentingan dunia Islam. Sejak dibentuknya OKI terhitung sepuluh kali melakukan Konferensi Para Raja dan Kepala Negara /Kepala Pemerintahan, yaitu :

Tabel I

Daftar Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam

Nama	Tempat	Waktu
KTT 1	Rabat, Maroko	22-25 September 1969
KTT 11	Lahore, Pakistan	22-24 Februari 1974
KTT 111	Mekah, Saudi Arabia	25-28 Januari 1981
KTT IV	Casablanca, Maroko	16-19 Januari 1984
KTT V	Kuwait	26-29 januari 1987

¹⁷Abdullah Al Ahsan, *The Organization of Islamic Conferences Herndon* (Amerika Serikat : Library of Congress Catalog, 1988), h.23

¹⁸ ibid

KTT VI	Dakkar, Senegal	19-21 Desember 1991
KTT VII	Casablanca, Maroko	13-15 Desember 1994
KTT VIII	Teheran, Iran	9-11 Desember 1997
KTT IX	Doha, Qatar	12-13 November 2000
KTT X	Kuala Lumpur	16-17 Oktober 2003
KTT XI	Dakkar, Senegal	13-14 Desember 2008
KTT XII	Kairo, Mesir	6-7 Februari 2013

Sumber : OIC.org diakses 14 September 2014

b) Konferensi Para Menteri

Dalam Bab 5 Pasal 10 Piagam OKI disebutkan bahwa Konferensi Para Menteri diadakan sekali setahun yang bertempat di negara-negara anggota. Pertemuan yang dihadiri oleh para menteri luar negeri tersebut akan memeriksa “progress report” implementasi keputusan-keputusan dari kebijakan yang diambil pada saat pertemuan puncak, mempertimbangkan implementasi kebijakan umum organisasi, dan mengadopsi keputusan dan resolusi perihal kepentingan bersama dalam pelaksanaan tujuan dan kebijakan umum organisasi.

Sampai saat ini terhitung sebanyak 40 kali OKI melaksanakan Konferensi Tingkat Menteri. Pelaksanaan KTM terakhir kali bertempat di Conakry Republik Guinea pada bulan Desember 2013.

c) Sekretariat Jendral

Sekretariat jendral merupakan organ eksekutif dalam OKI. Sekretariat jendral bertanggungjawab atas semua kegiatan yang diperlukan untuk menindaklanjuti resolusi dan rekomendasi-rekomendasi KTT dan KTM.

Sekretariat jendral ini bertempat di Jeddah, Saudi Arabia. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris jendral (Sekjen). Sekretaris jendral sendiri memiliki jabatan selama empat tahun tanpa ada masa perpanjangan. Sekjen dipilih saat KTM berlangsung. Beberapa Sekretaris Jendral yang pernah terpilih sejak didirikannya OKI sampai sekarang adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Daftar Sekretaris Jendral Organisasi Konferensi Islam

Tahun	Nama	Negara Asal
1971-1973	H.R.H Tengku Abdurrahman	Malaysia
1974-1974	H.E. Hassan Al-Toulhami	Mesir
1975-1979	H.E. Amadou Karim Gaye	Senegal
1979-1984	H.E. Mr. Habib Chatty	Tunisia
1985-1988	H.E. Syed Sharifuddin Pirzada	Pakistan
1989-1996	H.E. Dr. Hamid Algabid	Nigeria
1997-2000	H.E. Dr. Azeddine Laraki	Maroko
2001-2004	H.E. Dr. Abdelouahed Belkeziz	Maroko
2005-2013	H.E Prof. Dr. Akmeleddin Ihsanoglu	Turki
2014- sekarang	Mr. Iyad Ameen Madani	Saudi Arabia

Sumber : OIC.org diakses 14 September 2014

d) Mahkamah Islam Internasional

Mahkamah islam internasional merupakan pilar keempat dan badan peradilan tertinggi dalam OKI. Mahkamah ini berfungsi sebagai badan peradilan(badan hukum) tertinggi dalam OKI untuk meyelesaikan sengketa antar

anggota dengan cara damai. Mahkamah internasional ini dibentuk pada KTT ke-3 yang diselenggarakan di Mekah, Saudi Arabia. Saat ini mahkamah internasional tersebut berlokasi di Kuwait.

e) Komite Khusus

- 1) Komite Al-Quds (*Jerusalem Committee*)
- 2) Komite Tetap Keuangan (*Permanent Finance Committee*)
- 3) Komite Tetap Mengeni Informasi dan Kebudayaan(COMIAC)
- 4) Komite Tetap mengenai Ekonomi dan Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (COMSTECH)
- 5) Komite tetap untuk Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan (COMCEC)
- 6) dll

f) Badan-Badan Tambahan

- 1) Badan Dana Solidaritas Islam (*Islamic Solidarity Fund*)
- 2) Badan Dana Al-Quds (*Al-Quds Fund*)
- 3) Ankara Centre (SESRTCIC)
- 4) Pusat Penelitian Sejarah, Budaya dan Seni Islam
- 5) Pusat riset dan latihan tehnik dan kejuruan Islam (ICTVT).
- 6) Dll

g) Organ-Organ Khusus

- 1) Bank Pembanguna Islam
- 2) Kamar Dagang Industri dan Komoditas
- 3) Organisai Pendidikan, Penelitian dan Kebudayaan Islam
- 4) Organisasi Penyiaran Negara Islam (ISBO)

5) dll

B. Dinamika Peran OKI dalam Menyelesaikan Konflik di Dunia Islam

OKI didirikan tahun 1996 oleh para pemimpin negara Arab dan tas reaksi atas pembakaran masjid Al-Aqsha oleh kaum ekstremis Yahudi. Saat ini OKI menjadi organisasi terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan anggota sebanyak 57 negara.¹⁹Dilihat dari latar belakang dibentuknya OKI, dapat diamati bahwa dibentuknya OKI adalah sebagai upaya melindungi dan melayani kepentingan Timur tengah dan dunia Arab.

Sejak didirikannya OKI pada tahun 1996 beberapa upaya mencapai stabilitas negara-negara Islam telah banyak dilakukan. Salah satunya dengan cara peka terhadap isu dan permasalahan yang dihadapi negara anggota, baik permasalahan politik, sosial, ekonomi dan budaya. OKI berupaya merespon setiap permasalahan yang ada dengan memberikan bantuan penyelesain dalam setiap konflik yang dialami oleh negara anggota. Berikut ini penulis paparkan dinamika peran OKI dalam penyelesain konflik di dunia Islam.

1. Pelestina- Israel

Pada konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel OKI menaruh perhatian yang cukup serius dalam konflik ini. Diketahui latar belakang berdirinya OKI diawali dengan respon atas konflik Palestina, ketika terjadi pembakaran masjid Al-Aqsha. Dalam sejarah kontemporer konflik Palestina dan Israel dimulai

¹⁹ Op.cit *About OIC* diakses pada 10 September 2014

paska berakhir perang dunia 1. Setelah kemenangan Inggris dan Perancis atas lawan, kemudian dilanjutkan dengan keruntuhan Khalifah Ottoman di Turki, menyebabkan Turki harus menyerahkan wilayah kekuasaannya seperti Suriah dan Libanon kepada Inggris dan Perancis dibawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa. Pada waktu itu Yerusalem dan Beersheba dijadikan sebagai internasional zone, dimana Yerusalem Beersheba menjadi wilayah yang berada diawah mandat internasional dan pengawasan PBB.²⁰

Sebelumnya pada tahun 1917 menteri luar negeri inggris yang bernama Arthur James Balfour, membuat sebuah deklarasi yang disebut dengan deklarasi Balfour yang berisi bahwa orang-orang zionist seluruh eropa diperbolehkan bermigrasi ke tanah Palestina. Inti dari deklarasi tersebut adalah bahwa tanah palestina dijanjikan untuk dihuni oleh orang-orang yahudi. Ketika perjanjian tersebut berhasil, orang-orang yahudi dapat tinggal di Palestina namun tidak memiliki hak dalam sistem pemerintahan.

Pada tahun 1947 PBB membagi wilayah mandat Inggris atas Palestina berdasarkan penjanjian Balfour dengan 55% wilayah untuk Israel dan 45% wilayah untuk Palestina. Sedangkan kota Yarusaleem masuk kedalam zona internasional. Setahun kemudian pada tahun 1948 Israel menyatakan kemerdekaan negaranya secara sepihak, namun PBB dan Rusia pada waktu itu mengakui secara de Facto kemerdekaan Israel. Mengetahui keadaan ini, bangsa-bangsa Timur Tengah seperti Palestina, Mesir, Suriah, Irak, Libanon, Yordania, dan Arab Saudi

²⁰ George Lenczowski, *Timur Tengah di Kancah Dunia* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1993),h. 149

menabuh genderang perlawanan terhadap Israel. Perang dimulai pada tahun 1948 antara bangsa-bangsa Timur Tengah dengan palestina, sampai saat ini. Perang tersebut telah berhasil merenggut jalur gaza Palestina menjadi milik Israel. Perang telah menyebabkan kerugian materil dan imateril yang tidak terhitung banyaknya. Banyak korban yang merenggut nyawa dalam perang yang berlangsung sampai saat ini.

Palestina sebagai negara anggota OKI, dengan berbagai dorongan dan bantuan dari negara-negara anggota OKI lainnya berupaya bergotong royong mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Untuk OKI sendiri peran OKI terhadap konflik Palestina, sudah ditunjukkan sejak awal berdirinya OKI. Seperti diketahui berdirinya OKI karena adanya respons terhadap pembakaran msjid Al-Aqsha di Yerusalem. Saat awal terjadinya konflik, organisasi internasional dan OKI sulit menempatkan posisisi menyikapi konflik karena Palestina masih lemah dalam hal kedaulatan negara.²¹ Namun OKI menganggap bahwa isu Palestina merupakan isu yang sangat penting dalam kaitannya dengan persatuan umah maka semua anggota OKI dianggap penting untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik ini.

Negara-negara Arab merasa Palestina telah dikekang hak-haknya, oleh karena itu perlu dibantu. Hal ini lah yang mendorong OKI mengeluarkan beberapa sikap yang dianggap penting untuk penyelesaian Palestina. Yang pertama, ketika tempat suci dijajah oleh asing, masalah ini tidak jauh dari isu palestina. Oleh

²¹ Abdullah Al Ahsan, *The Organization of Islamic Conferences Herndon* (Amerika Serikat : Library of Congress Catalog, 1988), h 58

karana itu OKI menyatakan sikap tegasnya dengan menolak semua resolusi yang mementang status Palestina,sebelum tahun 1967.²² Kedua, OKI dengan tegas mendukung berdirinya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Mei 1964. Ketiga, OKI mengutuk semua negara yang mengadakan kerjasama politik, diplomatik, dan ekonomik dengan isreal.

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke dua di Karachi, Pakistan pada Desember tahun 1970 menghasilkan final komunike yang memutuskan untuk memfasilitasi perwakilan PLO melalui negara Muslim dan KTM yang dengan antusias mendukung perjanjian Kairo untuk melengkapi kerjasama kordinasi antara Yordania dan PLO dalam melawan Israel.²³

Bentuk keterlibatan OKI dalam konflik Palestina juga ditunjukkan pada KTM ke empat. OKI membuat sebuah kebijakan politik yang sangat penting yaitu OKI mengakui bahwa PLO merupakan perwakilan yang sah dari rakyat Palestina. OKI juga mendorong negara-negara anggota untuk memberikan ijin dibentuknya kantor PLO di negara-negara Islam. OKI mendorong relawan untuk ikut andil dalam Jihad (perang suci) untuk pembebasan tanah suci serta meminta negara-negara Islam untuk menjauhi hubungan politik dan ekonomi degan Israel.²⁴

²² Noor Ahmed Baba dalam Thesis Shahnaz Akhtar, *The Role of OIC in Political and Economic Cooperation of the Muslim Word* (Zakaria Univercity Multan :2002),h. 157

²³ Akhtar Shahnaz, *Thesis The Role of OIC in Political and Economic Cooperation of the Muslim Word* (Zakaria Univercity Multan: 2002),h. 159

²⁴ Ibid 163

Dalam KTT ke 12 yang diselenggarakan di Kairo Mesir pada Februari tahun 2013 menghasilkan beberapa kebijakan politik yang penting bagi Palestina. OKI menyerukan kepada negara-negara anggota untuk peka terhadap kesatuan ummah sehingga dengan sepenuh hati mengambil langkah-langkah praktis untuk menindaklanjuti hasil implementasi resolusi OKI. Negara-negara anggota diminta untuk mendukung anggaran dana pertahanan Palestina sebesar US \$ 100 juta serta iuran bulanan sebesar US \$ 20 juta yang digunakan untuk dana pertahanan Palestina.²⁵

Semua pembiayaan tersebut dilaksanakan melalui konferensi donor negara-negara anggota, Sekretaris Jendral, Islamic Developing Bank serta lembaga-lembaga internasional dan dalam koordinasi dengan Negara Palestina, untuk membiayai Rencana Strategis Bidang Pengembangan Kota Al Quds diadopsi oleh Konferensi Luar Biasa ke empat yang diselenggarakan di Makkah Al Mukarramah pada bulan Agustus 2012.

2. Nigeria

Nigeria adalah salah satu negara di benua Afrika yang termasuk kedalam anggota OKI. Nigeria termasuk ke dalam kelompok negara miskin. Padahal dilihat dari sumber daya alam yang dimiliki, Nigeria memiliki sumber daya alam yang melimpah. Faktanya Nigeria merupakan negara exportir minyak terbesar ke delapan di dunia, serta exportir kelima di Amerika Serikat. Pada kenyataannya

²⁵ "OIC Final Communiqué of Twelfth Session Of The Islamic Summit Conference The Muslim World" diakses dari situs OIC pada 5 Juni 2014

kemiskinan di Nigeria terjadi karena korupsi dan tidak efisiennya kinerja pemerintah.

Kondisi kemiskinan di Nigeria diperburuk lagi dengan maraknya konflik yang terjadi disana. Salah satunya adalah masalah Boko Haram. Konflik ini bisa dikategorikan sebagai konflik keamanan, karena antara kaum muslim dan kaum kristen di Nigeria saling berperang. Di sembilan belas wilayah utara Nigeria, suku Hausa dan Fulani merupakan mayoritas penduduk beragama islam dengan prosentase sebesar 95 %. Sedangkan 12 dari wilayah tersebut telah menerapkan hukum syari'ah.

Sedangkan wilayah selatan Nigeria sebanyak 16 wilayah dihuni oleh orang kristen dari suku Ibo. Mereka menguasai sumber minyak Nigeria, sehingga mereka dapat mengexport ke negara-negara lain. Begitu juga dengan lembaga keuangan, perusahaan, dan kebijakan pemerintah. Hal ini yang menyebabkan muslim di wilayah utara tidak mendapatkan akses memperoleh ilmu yang berkualitas, lapangan pekerjaan, dan kesehatan. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan kemiskinan menimpa muslim di wilayah utara.

Boko haram didirikan oleh Mohammed Yusuf di Maisuguri pada tahun 2002. Boko Haram sendiri memiliki arti "Pendidikan Barat yang haram". Yusuf merancang sebuah pendidikan bersistemkan islam. Pada perkembangannya Boko Haram juga menyentuh ranah politik dan ingin mendirikan sebuah negara dengan sistem islam dan sekolah adalah sarana untuk melakukan kaderisasi untuk membentuk para jihadis.

Pada tahun 2009 serangan besar-besaran dilakukan oleh pasukan Boko Haram untuk mewujudkan tujuan mereka. Mereka menyerang kantor-kantor polisi dan fasilitas negara lainnya. Penyerangan inilah yang mendorong meletusnya kontak senjata dimana-mana terutama di jalan-jalan. Penyerangan berlangsung sampai sekarang. Bulan pada 15 April 2014 kelompok ini menculik lebih dari 200 siswi yang menempuh pendidikan di sekolah wilayah Utara Nigeria yang dianggap sekuler oleh kelompok Boko Haram. Menurut Sekretaris Jendral OKI, Islam adalah agama yang toleran dan moderat yang menolak ekstremisme oleh karenanya tindakan ini sudah menodai citra baik Islam. Oleh karena itu dia menyerukan pembebasan para siswi tersebut dengan selamat kepada orang tua mereka.²⁶

Dalam merespon konflik keamanan di Nigeria ini, OKI sangat mendukung upaya pihak keamanan Nigeria dalam upaya memerangi kelompok-kelompok bersenjata dan teroris yang mengancam persatuan, perdamaian, dan keselarasan bernegara.²⁷ OKI sangat menegaskan dukungan penuh dan solidaritas terhadap pemerintah dan rakyat Nigeria.²⁸

Menyedari bahwa ekstremisme dan terorisme di Nigeria salah satunya dilatarnelakangi oleh faktor ekonomi, OKI melalui lembaga-lembaganya terus berupaya menekankan upaya dalam mengentaskan kemiskinan di negara-negara

²⁶ "OIC Secretary General Condemns Mass Abduction Of school Girls In Nigeria" diakses dari oic.org pada 15 September 2014

²⁷ Op.cit Cairo Final Communique of Twelfth Session Of The Islamic Summit Conference The Muslim World, diakses pada 5 Juni 2014

²⁸ ibid

anggota, termasuk Nigeria. Pertemuan Keamanan Para Menteri pada September 2013 yang diselenggarakan di Abujana, OKI yang diwakili Sekretaris Jendral telah menyumbangkan dana Program Pembanguna Afrika yang digunakan untuk rehabilitasi sosial dan infrastruktur di Nigeria dan negara-negara anggota OKI lainnya. Dana ini juga digunakan untuk pengembangan pendidikan anak-anak perempuan dan integrasi sekolah madrasah ke dalam kurikulum pendidikan modern.

3. Islamphobia

Fenomena islamphobia bukanlah fenomena yang baru bagi islam dan barat(kristen). Berabad-abad dahulu sejak perang salib terjadi islamphobia sudah muncul dan terkonstruksi dalam pikiran dan budaya barat. Sekitar abad XI persaingan ideologi persaingan ideologi, politik dan peradaban antara islam dan kristen terjadi. Islamphobia bisa dikatakan sebagai ketakutan berlebih terhadap islam termasuk juga terhadap pemeluknya.²⁹ Di barat isu terorisme dijadikan sebagai alat untuk melakukan *black campaign* terhadap islam. Misalkan saja paska terjadinya peristiwa Pengeboman Gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon pada 11 September 2001, Amerika Serikat secara terang-terangan mengeluarkan pernyataan perang terhadap terorisme. Peristiwa 11 September 2001 telah memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perubahan dalam

²⁹ Menghalau Islamophobia.htm diakses pada 15 September 2014

kepentingan nasional Amerika Serikat yang terefleksikan di dalam kebijakan luar negerinya khususnya bidang keamanan.³⁰

Fenomena Islamphobia di barat semakin meningkat ketika media melakukan propoganda dan begitu mendeskriditkan islam. Islam digambarkan sebagai agama yang meyukai kekerasan, intoleran, anti HAM, dan citra negatif lainnya. Fenomena islamphobia di Amerika dibarengi dengan merebaknya islamphobia di belahan dunia lainya termasuk Eropa. Hal ini terlihat dari makin meningkatnya intoleransi terhadap muslim di Eropa. Munculnya referendum di Swiss yang melarang pembangunan menara masjid merupakan salah satu kebijakan yang muncul aibat dampak islamphobia. Begitupun di Perancis, yang melarang penggunaan jilbab di tempat-tempat umum.³¹

Bentuk-bentuk kejahatan akibat islamphobia biasanya berupa pelecehan verbal dan diskriminasi, khususnya dibidang pendidikan dan pekerjaan. Serangan fisik juga terjadi pada tempat-tempat islam seperti perusakan masjid dan makam. Biasanya perempuan dan anak-anak merupakan pihak yang paling terkena diskriminasi karena pakaian yang dikenakan.

Meskipun barat menerima hadirnya islam di Eropa, namun tetap saja diskriminasi tetap terjadi. Hal ini yang memunculkan kecaman dari Sekretaris Jendral OKI. Pada pidatonya di markas besar Organisasi Kerjasama dan Keamanan Eropa di Wina tahun 2010, H.E Prof. Dr. Akmeleddin Ihsanoglu

³⁰ Makalah *Perubahan Kebijakan Keamana Amerika Serikat paska 11 September 2001 untuk Kawasan Asia Tenggara* oleh Dewi Triwahyuni, Universita Komputer Indonesia diakses 15 September 2014

³¹ <http://majalah.hidayatullah.com/?p=2866> diakses 20 September 2014

mengatakan sikap kebencian dan intoleran terhadap islam tersebut merupakan penghinaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat kaum muslimin.³²

Masalah islamphobia yang sedang dialami umat islam, tidak bisa diabaikan karena menyakut kehormatan Islam untuk itu, OKI menganggapi masalah ini dengan serius, salah satunya dengan membentuk The OIC Observatory on Islamophobia bertepatan di Jedah pada tahun 2007.

Pada Konferensi tingkat menteri yang ke 40 bertempat di Conakry Republik Guinea pada bulan Desember 2013, Observatorium OKI menyajikan keenam kali laporannya mengenai islamphobia. Dalam pidatonya diawal konferensi Sekretaris Jendral OKI menyatakan bahwa tindakan ekstrim islamphobia di Barat merupakan hambatan untuk terwujudnya tujuan piagam PBB dimana manusia harus mengedepankan toleransi dan hidup berdampingan secara damai.³³

Sebagai tindak lanjut menangani masalah islamphobia, OKI mengadakan kerjasama dengan negara Turki untuk menyelenggarakan konferensi Internasional Tentang Islamphobia Hukum dan Media yang diselenggarakan di Istambul pada bulan September 2013. Tujuan Konferensi ini antara lain mendukung diciptakannya Komite Penasihat Media dibawah payung OKI. Komite ini berpusat di Istambul yang digunakan untuk memberikan kontribusi dalam membangun media yang efektif dan strategik untuk memerangi islamphobia.

³² ibid

³³ "Sixth OIC Observatory Report on Islamophobia" di akses dari oic.org pada 10 September 2014

Pertemuan ini memuat beberapa kesimpulan.³⁴ Pertama, untuk mengingatkan bahwa stabilitas dan kohesi masyarakat yang didasarkan tidak hanya pada aturan hukum tetapi juga tentang perlunya menjaga ikatan persaudaraan, memahami dan menghargai agama dan budaya yang berbeda. Kedua, mempertahankan dialog internasional yang bersifat terbuka dan konstruktif dalam menanggapi isu islsamphobia. Ketiga, menggarisbawahi pentingnya bertindak melalui aksi internasional, berdasarkan yang diakui secara internasional mengenai prinsip dan standar hak asasi manusia. Keempat, pelaksanaan ketentuan Resolusi UNHRC 16/18 melalui mekanisme proses pada komite Istanbul yang menawarkan platform yang positif untuk debat. Kelima, memastikan bahwa Muslim terintegrasi dengan baik dalam masyarakat dan tidak mengalami diskriminasi rasial dan bentuk-bentuk diskriminasi yang dilembagakan serta pendirian strategi pendidikan yang komprehensif. Keenam, stakeholder yang relevan harus terus mengumpulkan dan memelihara data yang dapat dipercaya dan informasi tentang kejahatan dan kebencian akibat islamphobia

³⁴ Ibid